


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (yang telah di perbarui dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007), ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- 
- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah
 - b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
 - c. Penerimaan dan pengeluaran daerah
 - d. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada suatu perangkat kerja (SKPD) daerah
 - e. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri dan Standar Akuntansi Pemerintahan diatas, ternyata sudah lebih dahulu dijelaskan tentang perekonomian yang baik di dalam al-quran, dapat di lihat dalam surat AL-Baqarah ayat 28 dibawah ini tentang ekonomi yaitu : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Jelas sekali di terangkan dalam Al-quran betapa pentingnya kejujuran, bahkan jika saja jujur itu sudah tidak ada lagi didiri kita maka berdosalah hati kita, begitupun dalam bidang akuntansi yang sangat erat kaitannya dengan keuangan (hal yang sangat sensitif) maka kejujuran sangat dibutuhkan bahkan jadi acuan utama, dan dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan



pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan.

Bakhtiar Arif (2002) menjelaskan bahwa semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik. Perkembangan saat ini menyebabkan peran masyarakat yang diwakili oleh DPR semakin besar. Dengan adanya tuntutan transparansi sebagai hasil reformasi tahun 1998, pemerintah harus mampu menyediakan pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin memadai dan semakin baik, sehingga kepercayaan rakyat semakin tinggi terhadap pemerintah dalam mengelola uang.

Seperti yang dijelaskan oleh Bakhtiar Arif (2002) bahwa kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mencuat karena lemahnya akuntabilitas. Banyak demonstrasi yang menuntut akuntabilitas keuangan di beberapa negara. Kasus jatuhnya pemimpin pemerintah, seperti di Philipina, lebih disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas keuangan. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, Indonesia masih tergolong dalam sepuluh negara yang terkorup terbesar. Demikian juga berdasarkan laporan dari *Standard and Poor* (S&P), Indonesia masih termasuk negara rawan korupsi sehingga mempengaruhi investasi dan bantuan asing.



Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut

1. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya.
2. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek.

3. Pengeluaran kas yang tidak dapat di lakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil) maka dilakukan dengan menggunakan kas kecil yang diselenggarakan dengan imperest system.

Permasalahan sistem yang terdapat di Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tentang Pengeluaran Kas adalah terlambatnya Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) masing-masing bagian berakibat pada pengambilan uang berikutnya, Sistem dan jaringan internet yang kurang memadai membuat penginputan data dan laporan keuangan jadi lambat ini sangat berpengaruh pada kinerja pegawai dan tentu juga akan berdampak sekali pada pencairan uang untuk tahun berikutnya.

Jika pengumpulan SPJ dan pengajuan GU (GantiUang) terlambat, maka penerimaan kas tidak ada, hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian di Dinas Pangan Sumatera Barat, para pelaksana kegiatan tidak dapat melakukan pembelanjaan terhadap persediaan Dinas yang di butuhkan sebab kas tidak tersedia.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam sebuah laporan kerja praktek dengan judul: "*Sistem dan prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Dinas Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Pangan Sumatera Barat adalah "Bagaimana sistem pengeluaran kas pada Dinas Sumatera Barat yang dirinci dalam 4 sub masalah, yaitu :

- Tujuan
- Pelaksanaan
- Dokumen apa saja yang digunakan
- Unit yang terlibat dalam pengeluaran kas
- Flowchart prosedur pengajuan dana kegiatan ke bendahara pengeluaran

- Prosedur pengajuan dana kegiatan ke bendahara pengeluaran
- Pengendalian internal
- Penyimpanan dan pengarsipan dokumen keuangan
- Hal-hal yang harus diperhatikan oleh staf pengelola keuangan

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan dari laporan kerja praktek pada Dinas Pangan Sumatera Barat adalah :

1. Agar dapat memperoleh pengalaman kerja di instansi pemerintahan.
2. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di instansi pemerintahan. Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana pencatatan akuntansinya (pengeluaran kas), tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan kerja.
3. Membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan magang di instansi pemerintahan.
4. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja.

1.4 Manfaat penulisan

Manfaat penulisan, diantaranya :

1. Untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas pada instansi pemerintahan Untuk lebih memahami dengan membandingkan teori yang di peroleh dalam perkuliahan dengan prosedur yang ada pada instansi pemerintahan
2. Dapat merasakan bagaimana situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya.

1.5 Jenis dan Sumber Data

- Jenis data :
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tanpa diolah terlebih



dahulu, menyangkut informasi pelaksanaan, pemasukan, perencanaan dan pencatatan informasi.

b. Data sekunder, yaitu data lengkap yang diperoleh dari pihak Satuan Perangkat Kerja (SKPD) yang menyangkut sejarah singkat Satuan Perangkat Kerja (SKPD), struktur organisasi dan data lainya.

- Sumber data (data riil yang dibutuhkan)

a. Laporan tahunan 2017

b. Rencana strategis (Renstra) 2016-2021

c. Buku Kas Umum (BKU) 2017

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

e. Buku prosedur keuangan 2017

1.6 Metode Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah Dinas Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di jalan Raden saleh no.4

Teknik Pengumpulan Data adalah:

a. Wawancara yaitu dengan cara berdialog langsung dengan bendahara pengeluaran dan beberapa karyawan yang ada di bidang keuangan yang menangani pengeluaran kas yang mengawasi jalannya semua prosedur pencatatan pengeluaran kas.

b. Dokumentasi data, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan fotocopy data yang didapat dari Dinas Pangan Sumatera Barat.

1.7 Analisa Data

Untuk menganalisa data penulis ini, peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan yang terjadi di lapangan hingga



diambil suatu kesimpulan.

1.8 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang di laksanakan :

Tempat : Dinas Pangan Sumatera Barat

waktu : 40 hari kerja (18 Desember 2017 sampai 15 february 2018)

1.9 Sistematika penulisan

Dalam melakukan pembahasan laporan ini secara ringkas dapat di kemukakan penulis Laporan Kerja Praktek sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, tempat dan waktu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori terdiri dari pengertian sistem, pengertian akuntansi, pengertian sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, pengendalian intern, pengertian prosedur, sistem akuntansi pemerintah daerah, pengertian kas, sistem dan prosedur pengeluaran kas, unit organisasi yang terlibat

BAB III : Gambaran Umum Dinas Pangan Sumatera Barat, Visi dan Misi Dinas Pangan Sumatera Barat, Tujuan dan sasaran Dinas Pangan Sumatera Barat, strategi dan kebijakan ketahanan pangan struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia Dinas Pangan, kegiatan Dinas Pangan



BAB IV : Pembahasan tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas

BAB V : Bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

